**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN HUKUMAN MATI DI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Miftahul Jannah

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ekonomi dan Hukum Universitas Serasan

Email: miftahuljannah@unsan.ac.id

ABSTRAK

Pidana pokok yang ada di Indonesia tertuang dalam pasal 10 KUHP diantaranya adalah pidana pokok, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Hukuman mati masuk kedalam bagian dari pidana pokok dan merupakan hukuman dengan skala sanksi paling berat untuk pelaku tindak pidana luar biasa seperti narkoba, pembunuhan berencana, terorisme dan kejahatan terhadap keamanan negara. Di satu sisi, keberadaan sanksi berupa pidana mati dibutuhkan untuk kejahatan tertentu, namun di sisi yang lain penerapan hukum pidana mati di Indonesia dihadapkan pada hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup yang dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28A ayat (1). Meskipun terdapat pembaruan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru yang mengatur masa percobaan selama 10 tahun, pro dan kontra tetap terjadi dalam penerapan pidana mati.

Kata kunci : Hukum, Pidana Mati, Kejahatan

ABSTRACT

The main crimes in Indonesia are stated in article 10 of the Criminal Code (KUHP), including the basic crimes, confiscation of certain items and announcement of the judge's decision. The death penalty is part of the basic punishment and is the punishment with the most severe scale of sanctions for perpetrators of extraordinary crimes such as narcotics, premeditated murder, terrorism and crimes against state security. On the one hand, the existence of sanctions in the form of the death penalty is necessary for certain crimes, but on the other hand the application of the death penalty law in Indonesia is faced with human rights, especially the right to life which is guaranteed by the 1945 Constitution Article 28A paragraph (1). Even though there are updates in the latest Criminal Code (KUHP) which regulates a probationary period of 10 years, the pros and cons still exist in implementing the death penalty.

Keywords :law, death penalty, crime

PENDAHULUAN

Hukum merupakan suatu pedoman yang mengatur pola hidup manusia yang memiliki peranan penting dalam mencapai tujuan ketentraman hidup bagi masyarakat. Oleh karena itulah, hukum mengenal adanya adagium. Adagium ini muncul karena hukum ada karena adanya masyarakat dan hubungan antar individu dalam bermasyarakat. Hubungan antar individu dalam bermasyarakat merupakan suatu hal yang hakiki sesuai kodrat manusia yang tidak dapat hidup sendiri karena manusia adalah makhluk polis, makhluk yang bermasyarakat. Maka untuk itulah dalam mengatur hubungan-hubungan

hukum pada masyarakat diadakan suatu kodifikasi hukum yang mempunyai tujuan luhur yaitu menciptakan kepastian hukum dan mempertahankan nilai keadilan dari substansi hukum tersebut. Sekalipun telah terkodifikasi, hukum tidaklah dapat statis karena hukum harus terus menyesuaikan diri dengan masyarakat, apalagi yang berkaitan dengan hukum publik karena bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak dan berlaku secara umum.

Hukum pidana yang domeinnya sebagai hukum publik membuat perkembangan hukum pidana selalu menjadi sorotan di tengah masyarakat. Contoh kecil yang dapat kita lihat ialah bagaimana respon masyarakat yang sangat antusias terhadap wacana penegasan ancaman pidana mati terhadap para koruptor.

Menurut Hegel Negara ialah realitas "*Roh*" atau kesadaran, yang menjawab pertentangan dalam masyarakat. Tanpa Negara pertentangan yang ada di dalam masyarakat tidak dapat diselesaikan. Maka menyikapi permasalahan dan pertentangan yang terjadi di dalam pembaharuan hukum pidana, Negaralah yang harus mengambil kebijakan guna mencegah terjadi pertentangan yang semakin meluas yang bukannya mendatangkan solusi melainkan melahirkan debat kusir yang tak bermakna.

Sebuah pro dan kontra atau pertentangan pendapat yang masih terus berlangsung dalam domein hukum pidana sebagaimana tersebut di atas ialah mengenai keberadaan lembaga pidana mati baik dalam kedudukan sebagai hukum positif maupun dalam upaya pembaharuan hukum pidana sebagai bagian dari hukuman (pidana). Sebagaimana diketahui eksistensi lembaga pidana-pidana mati dituangkan dalam KUHP pasal 10 hukuman atau pidana, yang secara terperinci menyatakan sebagai berikut :

Pasal 10. Pidana terdiri atas:

- a. Pidana pokok :
 1. pidana mati.
 2. pidana penjara :
 - a. pidana seumur hidup
 - b. pidana penjara selama waktu tertentu (setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun).
 3. pidana kurungan.
 4. Pidana denda.
 5. pidana tutupan.

Berdasarkan uraian pasal 10 KUHP tersebut dapatlah diketahui bahwa lembaga pidana mati merupakan salah satu hukuman yang masih jelas keberadaannya sebagai bagian dari hukuman (pidana) yang dapat dijatuhkan. Pro dan kontra mengenai pidana mati bukanlah suatu pertentangan yang baru timbul di tengah masyarakat luas dan para ahli hukum namun telah terjadi semenjak dahulu dan sebagai bukti. Apakah pidana mati hanya merupakan suatu alasan murah bagi penguasa Negara sebagai alat penegak untuk mempertahankan tertib hukum dalam memberantas penjahat-penjahat ulung dan berkaliber besar dengan ancaman maut, belum termasuk daftar perhitungan terhadap orang-orang yang tak dapat dikenakan baju penjahat karena mereka adalah seperti lazim diberi julukan penjahat politik merupakan salah satu alasan beliau untuk mempermasalahkan pidana mati dalam tulisannya mengenai eksistensi pidana mati di Negara Pancasila.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian. Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Pada penelitian ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin & Asikin, 2019). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni berfokus pada bagaimana pengaturan dalam peraturan perundang-undangan berkenaan dengan pidana mati.

HASIL DAN PENELITIAN

pelaksanaan pidana mati di Indonesia pada mulanya dilaksanakan menurut ketentuan dalam pasal 11 KUHP yang menyatakan bahwa “pidana mati dijalankan oleh algojo atas penggantungan dengan mengikat leher si terhukum dengan sebuah jerat pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan dari bawah kakinya”. Dalam keberadaan Indonesia sebagai negara hukum, Indonesia berdiri berdasarkan hukum yang ada. Pasal tersebut kemudian diubah dan dijelaskan dalam Undang-undang atau UU No. 2/PNPS/1964 dimana hukuman mati yang dijatuhkan kepada orang sipil dilakukan dengan cara menembak mati. Dalam pelaksanaannya sebagai negara hukum, banyak pro dan kontra ketika negara hukum ini berusaha menegakkan hukum dan menjatuhkan hukuman mati bagi terdakwa. Hukuman mati bukanlah sebuah hukuman yang diberikan kepada tersangka di mana tersangka pelaku kejahatan tersebut dihukum dengan dipenjara seumur hidupnya hingga mati.

Tata cara pelaksanaan Hukuman Mati berdasarkan UU No. 2/PNPS/1964 yaitu:

1. Tiga kali 24 jam sebelum eksekusi, jaksa memberitahukan terpidana tentang rencana hukuman mati.
2. Apabila terpidana hamil maka pelaksanaan hukuman mati dilaksanakan 40 hari setelah kelahiran anaknya
3. Kepala polisi daerah membentuk tim regu tembak yang terdiri dari seorang Bintara, 12 orang tamtama, dibawah pimpinan seorang perwira.
4. Setibanya ditempat pelaksanaan pidana mati, komandan pengawal menutup mata terpidana dengan sehelai kain.
5. Jarak terpidana dengan regu tembak tidak lebih dari 10 meter dan tidak kurang dari 5 meter.
6. Komandan regu tembak dengan menggunakan pedang memberikan isyarat dan memerintahkan anggotanya membidik jantung terpidana.
7. Apabila terpidana masih memperlihatkan tanda kehidupan, maka regu penembak melepaskan tembakan terakhir dengan menekan ujung laras senjata pada kepala terpidana tepat di atas telinga.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memberlakukan hukuman mati sebagai salah satu hukuman dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Walaupun amandemen kedua konstitusi UUD '45, pasal 28 ayat 1, menyebutkan: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan

hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”, tapi peraturan perundang-undangan dibawahnya tetap mencantumkan ancaman hukuman mati. Dan di Indonesia sudah puluhan orang dieksekusi mati mengikuti sistem KUHP peninggalan kolonial Belanda. Bahkan selama Orde Baru korban yang dieksekusi sebagian besar merupakan narapidana politik. Selain itu dalam vonis hukuman mati, dapat terjadi kemungkinan-kemungkinan kesalahan dalam menjatuhkan keputusan bersalah atau tidaknya terdakwa. Di mana orang yang telah dieksekusi bukanlah yang bersalah atau menjadi kambing hitam dari pelaku sesungguhnya. Kesalahan inilah yang harus dihindari dan menjadi kelemahan dalam vonis hukuman mati. Oleh karena itu, dalam rangka menghindari kesalahan vonis mati terhadap terpidana mati, sedapat mungkin aparat hukum yang menangani kasus tersebut adalah aparat yang mempunyai pengetahuan luas dan sangat memadai, sehingga Sumber Daya manusia yang disiapkan dalam rangka penegakkan hukum dan keadilan adalah sejalan dengan tujuan hukum yang akan menjadi pedoman didalam pelaksanaannya, dengan kata lain khusus dalam penerapan vonis mati terhadap pidana mati tidak ada unsur politik yang dapat mempengaruhi dalam penegakkan hukum dan keadilan dimaksud.

KESIMPULAN

Tujuan Pidanaan di Negara Pancasila yaitu untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik agar mendidik orang yang telah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungan.

Pemidanaan, yaitu pencegahan dan retribusi. Dasar retribusi menganggap bahwa pelanggar akan dinilai dengan sanksi yang patut diterima oleh mereka mengingat kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya, sanksi yang tepat akan mencegah para kriminal melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan. Pidana Mati merupakan hukuman yang dilaksanakan dengan merampas jiwa seseorang yang melanggar ketentuan undang-undang. Tujuan diadakan dan dilaksanakan hukuman mati supaya masyarakat memperhatikan bahwa pemerintah tidak menghendaki adanya gangguan terhadap ketentruman yang sangat ditakuti oleh umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Darji Darmodiharjo & Shidarta (2019) *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Moeljatno. (2020) *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT RINEKA CIPTA, Jakarta.
- P.AF. Lamintang & D. Simons, (1992) *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, Pionir Jaya, Bandung.
- R. Soesilo,(2020) *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Dan Delik-Delik Khusus*, Politea, Bogor.